

**ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI KESEHATAN KEUANGAN  
DAERAH MELALUI PENGUKURAN INDIKATOR KONDISI KEUANGAN  
PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2020 (STUDI KASUS KOTA  
PROBOLINGGO TAHUN 2017-2020)**

**Karisma\*, Maslichah\*\*, Afifudin\*\*\***

[karisma0403@gmail.com](mailto:karisma0403@gmail.com)

**Universitas Islam Malang**

**ABSTRACT**

*This study aims to show it based on measurements of financial position indicators of Permendagri Number 19 of 2020, indicators of short-term solvency and long-term solvency have a trend that is still fluctuating but not too significant and the ratio value is close to or exceeds number 1 so that it indicates that the City of Probolinggo is still able to deal with matters related to operational expenses and obligations, both long term and short term. Then related to the solvency indicators of the Probolinggo city service, there is a trend that tends to increase every year, meaning that the expenditures spent, especially those related to serving the community by the Probolinggo City government, are getting better, however, this assessment indicator should also be applied to assess accuracy in terms of service delivery to the community. While related to financial conditions before and during the pandemic, Probolinggo City's income tends to decrease overall compared to the previous Covid-19 pandemic, the decline was due to transfer income originating from balancing funds and transfer income from the provincial government.*

**Keywords :** *Indicators of Conditions Finance, Local Government, Permendagri No 19 of 2020, Dimensions*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Menurut Hakim (2018) mengatakan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah ialah pemberdayaan untuk membuat keputusan daerah secara lebih bebas dalam rangka mengelola sumber daya yang sesuai dengan potensi daerah. Untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah, diperlukan kekuasaan yang luas dengan tanggung jawab yang nyata dan keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah termasuk dalam lembaga yang tidak berorientasi pada laba, namun seringkali pemerintah terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi, bahkan ia juga menjalankan fungsi ekonomi dengan mengelola perekonomian negara, termasuk pengaturan terhadap pendapatan perpajakan, penerimaan dan sejenisnya, serta pengeluaran yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan daerah dengan keinginan masyarakat (Hastaningrum & Ritonga, 2015).

Secara umum, lembaga pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada masa Orde Baru, pemerintah daerah tidak melaksanakan upaya untuk menghasilkan pendapatan karena semua pendanaan ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun semenjak adanya krisis yang melanda Indonesia di tahun 1997, kejadian tersebut menyadarkan pihak pemerintah bahwasanya perlu adanya reformasi di dalam sistem pemerintahan secara total yaitu pemberlakuan otonomi daerah untuk pemeratakan pembangunan sehingga tidak ada ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi daerah ditujukan agar penanganan pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat serta mempermudah pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memiliki otonomi daerah menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan demokrasi, demokratisasi, dan peningkatan kualitas pengawasan melalui lembaga legislatif.

Kesulitan keuangan suatu entitas dapat dijelaskan antara dua ekstrem, yaitu kesulitan keuangan jangka pendek atau lebih ringan yang dikenal sebagai kesulitan likuiditas, dan kesulitan keuangan yang lebih parah biasanya disebut sebagai kesulitan insolvensi. jangka pendek sementara jangka pendek, jika tidak segera diperbaiki akan berubah menjadi kebangkrutan dan menyebabkan kebangkrutan unit. Oleh karena itu, otonomi daerah setiap entitas harus mampu mengenali tanda-tanda kesulitan keuangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk mencegah potensi kebangkrutan.

Menurut (Brigham & Daves, 2010) penyebab kesulitan tersebut adalah rangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat dan kelemahan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan manajemen dan kurangnya upaya untuk memantau kondisi keuangan yang mengarah pada penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan keuangan, seperti tidak didukung oleh kondisi perekonomian yang baik di suatu negara, mau tidak mau akan mempengaruhi kinerja manajemen di negara tersebut. Kondisi ini terjadi ketika inflasi tinggi, krisis mata uang atau kondisi ekonomi lemah yang disebabkan oleh kondisi lain seperti pandemi Covid-19.

Perubahan posisi anggaran ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap situasi fiskal dengan melakukan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan dan Petunjuk Teknis Perubahan Anggaran yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Pandemi Covid-19 Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sejauh ini pemerintah daerah tidak memiliki kesadaran (*awareness*) terhadap kesehatan keuangan daerah, karena pendapat yang wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dianggap sebagai acuan keberhasilan pengelolaan keuangan daerahnya.

Secara keseluruhan, peneliti setuju bahwa kesejahteraan finansial adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menyediakan layanan yang dibutuhkan penduduk. Penelitian tentang keuangan pemerintah daerah baru dilakukan sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat (Kloha, 2005). Brown (1993) memasukkan sepuluh indikator dalam model untuk mengukur kesehatan masyarakat lokal dengan “10-point test”. Studi ini berfokus pada pengembangan model pengukuran yang mempertimbangkan kondisi pemerintah daerah di Indonesia. Ada 6 (enam) aspek untuk menilai posisi keuangan pemerintah daerah, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas fiskal, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian finansial.

Alasan peneliti mengambil judul tersebut adalah untuk mencari penelitian baru dengan variabel yang sama disertai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi kondisi keuangan daerah dengan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang mau tidak mau menimbulkan perbedaan kondisi keuangan pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah melalui**

## **Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Kota Probolinggo Tahun 2017-2020)”.**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis perkembangan kondisi keuangan Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2017-2020?
2. Bagaimana kondisi keuangan Pemerintah Daerah melalui Permendagri No 19 Tahun 2020?
3. Bagaimana pengukuran indikator kondisi keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi keuangan Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan Pemerintah Daerah melalui Permendagri No 19 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran indikator kondisi keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020.

#### **Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam dunia pendidikan maupun dunia pemerintahan di Indonesia. Manfaat yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan kemampuan ilmiah serta dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari oleh peneliti.

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan gambaran informasi atau referensi dan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya selanjutnya agar dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

- b. Bagi Bidang Ilmu

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan ilmu akuntansi khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan pemerintah publik maupun daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Perguruan Tinggi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

- b. Bagi Instansi/Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap APBD serta Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang menyertainya.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Lumbantoruan & Hidayat (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Situasi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran yang praktis dan berguna untuk mengelola situasi keuangan pemerintah

daerah di Indonesia. Model tersebut berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk menyatukan dan menilai situasi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK), selain untuk mengukur kesehatan keuangan pemerintah daerah, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi situasi pemerintah daerah, sehingga dapat dianalisis dan diukur secara cermat.

Mokodompit (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan kinerja anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang berguna untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio-rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan desentralisasi masih kurang, tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, dan tingkat kemandirian masih sangat tinggi.

Hastaningrum & Ritonga (2015) melakukan penelitian berjudul “Analisis Situasi Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Jawa Tahun 2011-2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif posisi keuangan pemerintah daerah di Jawa periode 2011-2015 dan mengukur posisi keuangan yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu solvabilitas, pembayaran jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan, dan otonomi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan opini wajar memiliki kondisi keuangan yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2015, peringkat kondisi keuangan tertinggi untuk masing-masing pemerintah daerah adalah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Suryani & Basri (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Aceh dan Sumatera Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan kabupaten/kota Aceh dan Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013 dan mengkaji apakah kondisi keuangan kabupaten/kota Aceh berbeda dengan keuangan kabupaten/kota lainnya. Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2013 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa kabupaten/kota di Aceh memiliki posisi keuangan daerah yang lebih baik daripada kabupaten/kota di Sumatera, dan bahwa kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki tingkat keuangan daerah yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah daerah di Aceh harus lebih fokus pada peningkatan kapasitas keuangan daerah dengan meningkatkan PAD dan investasi berdasarkan potensi daerah Aceh.

Melalolin (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Daerah di Wilayah Maluku Barat Daya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Daerah Maluku Tenggara Barat dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan APBD dengan perhitungan APBD Badan Pengelola MTB dari Surplus anggaran 2009 hingga 2013 fluktuatif dari tahun ke tahun. Sejak 2009 hingga 2013, kontribusi PAD terhadap APBD terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi selain PAD dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Maizunati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa-Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan kota Magelang berdasarkan ukuran yang komprehensif dan untuk mengetahui komparabilitas posisi keuangan kota Magelang dengan kota-kota lain yang berpotensi tinggi, secara sosial ekonomi setara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Kota Magelang cukup baik diantara kota-kota

kelompok 3. Pemerintah Kota Magelang harus mengoptimalkan upayanya untuk mencari sumber-sumber keuangan dan basis pajak baru, sehingga posisi keuangan secara keseluruhan dapat dipertahankan di tengah momentum pertumbuhan, kondisi sosial ekonomi yang ada.

Hakim (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan bantuan angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data dengan menampilkan hasil hingga penentuan kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman 2010-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dapat dikatakan baik, sesuai dengan target anggaran tahun sebelumnya.

Yati & Asmara (2020) melakukan penelitian berjudul “Analisis Indeks Status Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi keuangan pemerintah daerah di provinsi Aceh periode 2015-2017 dengan menggunakan model 6 dimensi yang dikembangkan dan dilengkapi oleh Ritonga (2014) dimensi solvabilitas operasional. Hasil penelitian kondisi keuangan daerah ini sesuai dengan teori keagenan, sehingga secara keseluruhan rata-rata indeks kondisi keuangan daerah berada pada kategori cukup dan bahkan ada yang dalam kategori baik, walaupun masih terdapat 3 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori baik, kategori tidak sempurna.

## **Tinjauan Teori**

### **1. Perkembangan Konsep tentang Kondisi Keuangan Daerah**

Secara umum, Ritonga (2014) menyimpulkan bahwa posisi keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban dan kewajiban jangka pendek, jangka panjang dan jangka panjang), memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga mengantisipasi peristiwa dan untuk menggunakan hak keuangan mereka secara efektif dan efisien. Menurut peneliti sebelumnya, Kioko (2013) sependapat bahwa status keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan kemampuan menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah berkaitan dengan besaran anggaran dan alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sempurnanya pemerataan pembangunan daerah juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaporan keuangan daerah, terutama di daerah terpencil dan terisolir yang sulit mengakses informasi di internet atau karena kurangnya sumber daya tenaga kerja yang ada (Rachmawi et al., 2016).

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan deskripsi dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat tertarik dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah mengalihkan sumber keuangan ke daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **2. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2020**

Kondisi keuangan pada hakekatnya adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai layanannya secara berkelanjutan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada untuk bertahan dengan gangguan ekonomi regional dan regional serta merespon tuntutan pertumbuhan, penurunan, dan perubahan alam. Menurut Ritonga (2014) mengukur kesehatan keuangan suatu negara dari sudut pandang realisasi, kerentanan dan fleksibilitas dalam konteks ekonomi dan keuangan global. Sustainability atau kelayakan finansial adalah kondisi kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan program yang ada dan memenuhi kebutuhan kreditur tanpa beban utang dalam perekonomian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2020 tentang Pengukuran Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu: untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pengukuran keuangan daerah. pengelolaan. indeks, Menteri Dalam Negeri menerapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah pada tingkat provinsi, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dan kota, dan atas dasar pertimbangan harus ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri tentang Pengukuran Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.

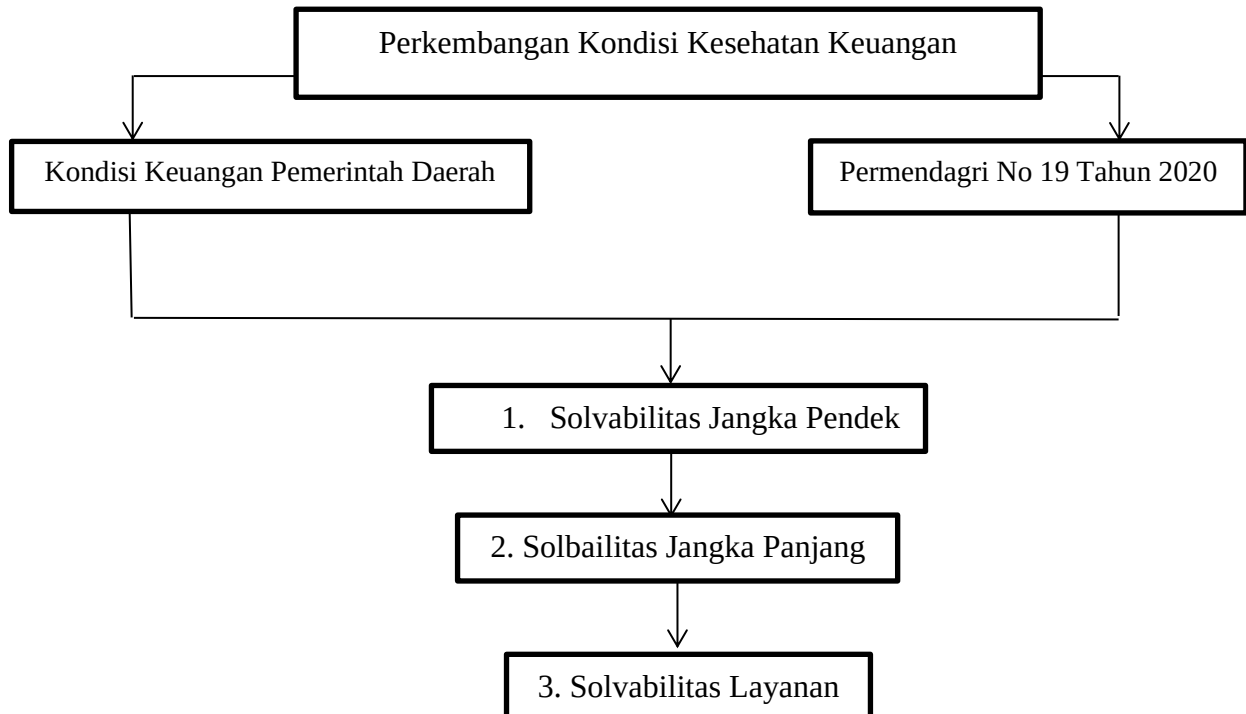
### 3. Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020

Berdasarkan konsep posisi keuangan pemerintah daerah sebelumnya, model pengukuran Ritonga dkk (2012, 2012b) dan Ritonga (2014) memberikan 6 (enam) dimensi pengukuran, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas fiskal, solvabilitas jangka panjang, -ketentuan. - Kemampuan untuk membayar jangka waktu. solvabilitas jangka, solvabilitas keuangan, fleksibilitas, kemandirian finansial dan solvabilitas layanan. Model pengukuran ini selalu menggunakan akuntansi kas untuk akuntansi akrual. Akuntansi akrual penuh yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak 2015 menambah dimensi pengukuran lain, yaitu solvabilitas operasi. Keenam dimensi tersebut membentuk 29 indikator kesehatan keuangan yang dibangun berdasarkan informasi keuangan yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan kondisi sosial ekonomi pemerintah daerah di Indonesia.

#### Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori, digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.3 Kerangka Konseptual**





## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggali lebih dalam situasi keuangan pemerintah daerah dengan indikator yang komprehensif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

Lokasi penelitian adalah objek penelitian atau pengumpulan data, yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Probolinggo yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah Pemerintah Kota Probolinggo. Sedangkan objek penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi keuangan daerah Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Yati & Asmara, 2020).

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional suatu variabel adalah penjelasan dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian tentang indikator-indikator yang menyusunnya atau tentang batasan-batasan variabel yang dipermasalahkan untuk dijadikan pedoman dalam penelitian. Untuk memudahkan interpretasi teori yang berbeda, beberapa definisi yang terkait dengan variabel penelitian akan didefinisikan.

#### **1. Perkembangan Konsep tentang Kondisi Keuangan Daerah**

Kamnikar dkk. (2006) dalam Ritonga (2014) mengembangkan definisi posisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan definisi yang dikembangkan oleh ICMA (2003) dan CICA (1997). Kedua organisasi profesi tersebut mendefinisikan keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban mereka yang telah matang dan untuk terus memberikan layanan kepada konstituen dan masyarakat yang membutuhkan.

#### **2. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah melalui Permendagri No 19 Tahun 2020**

Kedudukan keuangan merupakan prioritas yang sangat penting dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah menilai kesehatan keuangan mereka terbatas, dan tidak hanya berdasarkan opini yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kondisi keuangan pemerintah daerah dengan demikian merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan hak keuangannya dengan baik, memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, dan mempertahankan tingkat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Ritonga et al. (2012, 2012b) berpendapat bahwa situasi keuangan yang sehat dimungkinkan jika pemerintah daerah mampu menggunakan hak keuangannya secara efektif dan efisien serta mampu memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan negara. Model ini telah diterapkan untuk mengukur posisi keuangan pemerintah daerah di AS. Penerapan FTMS pada pemerintah daerah di AS membuktikan bahwa FTMS merupakan model pengukuran yang efektif dan praktis untuk mempersatu dan menilai posisi keuangan pemerintah daerah.

#### **3. Perubahan Pengukuran Indikator Kondisi Kesehatan Keuangan berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020**

Melakukan pengukuran pada setiap indikator kondisi keuangan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017-2020. Berikut indikator kondisi keuangan yang digunakan Permendagri No. 19 Tahun 2020 :

- a. Solvabilitas Jangka Pendek = 
$$\frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$
- b. Solvabilitas Jangka Panjang = 
$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$
- c. Solvabilitas Layanan = 
$$\frac{\text{Total Asset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$
- d. Melakukan analisis dan penarikan kesimpulan setelah melakukan elaborasi dan perhitungan terhadap data yang diperoleh, peneliti membuat kesimpulan sebagai hasil penelitian.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini meliputi data sekunder yang telah diolah dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram menurut Husein Umar (2013:42). Pengumpulan data dokumentasi selama penelitian dan dari arsip data kondisi keuangan daerah tahun 2017-2020. Adanya sumber data ini dapat memperkuat data sekunder terhadap data tersebut sehingga hasilnya akurat.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan dilakukannya suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling dengan data yang telah dikumpulkan berupa angka-angka yang tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.

#### 1. Observasi

Tersiana (2018:12) mendefinisikan observasi, sebagai proses mengamati secara mendalam dan mengamati perilaku dalam kondisi tertentu. Pada dasarnya, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas, individu, dan peristiwa dari sudut pandang. Dalam penelitian dan observasi ini, peneliti mengamati secara langsung perilaku atau subjek penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar telah dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa foto-foto yang telah diambil oleh peneliti dan diperoleh selama kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi dalam proses pembangunan kesehatan kondisi keuangan daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk membuat pendapat atau pendapat yang benar dari data berupa kata-kata. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah kembali secara kualitatif kemudian dideskripsikan dalam bentuk deskriptif.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif. Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan yang menitikberatkan pada penyederhanaan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, langkah awal yang dilakukan adalah mencari informasi dari hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya dengan cara memilah dan memfokuskan pada laporan keuangan Pemkot Probolinggo Tahun 2017-2020.



## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah kedua yang harus dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif. Penyajian data menggunakan data yang telah direduksi. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti menarik kesimpulan. Dengan menggunakan suatu metode akan lebih mudah untuk memahami dan merencanakan apa yang telah dicapai. Sebagai hasil dari reduksi dan penyajian data, peneliti kemudian menyajikan data sebagai bentuk, tabel atau diagram yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020. Tata cara analisis kondisi keuangan daerah berdasarkan Ritongga (2014) dalam studi kasus ini sebagai berikut :

- Menghitung Indeks Indikator dan Indeks Dimensi
- Menghitung Indeks Kondisi Keuangan
- Mendeskripsikan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan penting dari analisis data dimana akan ada jawaban terkait penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, langkah terakhir yang dilakukan adalah memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah terkait kondisi keuangan pemerintah Kota Probolinggo.

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, bertujuan untuk membentuk opini atau pendapat yang benar dari data dalam bentuk verbal. Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan kegiatannya dalam pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas dan transparansi, sehingga terlihat seluruh kegiatan dan fungsi kinerja yang telah dicapai melalui laporan keuangan. kepada publik. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dengan menggunakan basis akuntansi yang mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan pedoman yang berlaku saat ini dengan menggunakan metode akuntansi akrual yang dikenal dengan PP Nomor 71 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evolusi kondisi kesehatan keuangan daerah melalui pengukuran indikator kesehatan keuangan Permendagri No. 19 Tahun 2020.

### Hasil Analisa Data dan Pembahasan

#### Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017-2020

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**Tabel Realisasi PAD, Pendapatan, Belanja & Transfer Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017-2020**

| TAHUN | PAD                   |                    |                      |
|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|       | Jumlah                | Realisasi          | Pelampauan %         |
| 2017  | Rp 183.605.221.900,66 | 203.937.860.275,87 | Rp 20.332.638.375,21 |
|       | 100%                  | 111,07%            | <b>11,07%</b>        |
| 2018  | Rp 172.302.877.370,90 | 175.789.670.858,90 | Rp 3.486.793.488,00  |
|       | 100%                  | 102,02%            | <b>2,02%</b>         |
| 2019  | Rp 183.644.060.625,66 | 175.775.285.716,82 | -Rp 7.868.774.908,84 |
|       | 100%                  | 95,72%             | <b>-4,28%</b>        |
| 2020  | Rp 172.577.213.110,66 | Rp 183.680.648.895 | Rp 11.103.435.785    |
|       | 100%                  | 106,44%            | <b>6,44%</b>         |

| TAHUN | PENDAPATAN           |                    |                    |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
|       | Jumlah               | Realisasi          | Pelampauan %       |
| 2017  | Rp 904.125.184.604   | Rp 910.852.078.016 | Rp 6.726.893.412   |
|       | 100%                 | 100,74%            | <b>0,74%</b>       |
| 2018  | Rp 960.958.978.587   | Rp 987.602.131.968 | Rp 26.643.153.381  |
|       | 100%                 | 102,77%            | <b>2,77%</b>       |
| 2019  | Rp 1.039.481.193.961 | Rp 962.134.794.309 | -Rp 77.346.399.652 |
|       | 100%                 | 92,56%             | <b>7,44%</b>       |
| 2020  | Rp 922.401.711.703   | Rp 922.027.675.563 | -Rp 374.036.140    |
|       | 100%                 | 99,96%             | <b>-0,04%</b>      |

| TAHUN | BELANJA & TRANSFER   |                      |                     |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
|       | Jumlah               | Realisasi            | Pelampauan %        |
| 2017  | Rp 1.166.661.552.002 | Rp 957.598.284.550   | -Rp 209.063.267.453 |
|       | 100%                 | 82,08%               | <b>-17,92%</b>      |
| 2018  | Rp 1.195.056.220.130 | Rp 947.112.971.040   | -Rp 247.943.249.090 |
|       | 100%                 | 79,25%               | <b>-20,75%</b>      |
| 2019  | Rp 1.305.945.473.977 | Rp 1.058.974.718.131 | -Rp 246.970.755.846 |
|       | 100%                 | 81,09%               | <b>-18,91%</b>      |
| 2020  | Rp 1.082.004.882.501 | Rp 877.667.480.575   | -Rp 204.337.401.925 |
|       | 100%                 | 81,11%               | <b>-18,89%</b>      |

Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa pada tahun 2017-2020, kinerja pendapatan Kota Probolinggo cukup fluktuatif dengan kinerja pendapatan terendah pada tahun 2019 (92,56%). Demikian pula belanja dan transfer juga mengalami fluktuasi dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 82,08% mencapai Rp 957.598 miliar. Kinerja PAD juga bervariasi dari tahun ke tahun dengan catatan PAD unaudited pada tahun 2020 mencapai Rp 183.689.824.488,19 miliar. Angka ini mewakili 19,91% dari total penjualan yang dilakukan di Kota Probolinggo.

## 2. Neraca

| AKUN            | JUMLAH                  |                         |                         |                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    |
| Aset Tetap      | Rp 1.260.067.192.535    | Rp 1.301.883.268.367,33 | Rp 1.384.089.316.597,47 | Rp 1.688.834.065.945,69 |
| Total Asset     | Rp 1.592.418.090.129    | Rp 1.681.777.703.189,04 | Rp 1.496.947.662.535,76 | Rp 1.795.842.215.918,07 |
| Total Kewajiban | Rp 14.981.305.536,23    | Rp 13.059.407.482,06    | Rp 7.084.525.875,94     | Rp 17.127.685.544,34    |
| Ekuitas         | Rp 1.577.436.784.592,93 | Rp 1.668.718.295.704,99 | Rp 1.681.751.560.010,74 | Rp 1.778.714.530.373,73 |

Total asset Kota Probolinggo tahun 2017 yaitu Rp. 1.592.418.090.129,15 dengan kontribusi terbesar dari asset tetap sebesar Rp. 1.260.067.192.535,46. Pada tahun 2018 total asset Kota Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 5,61% atau Rp. 1.681.777.703.189,04 dan kontribusi terbesar masih dari asset tetap. Pada tahun 2019 total asset Kota Probolinggo kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,06% atau Rp. 1.496.947.662.535,76 dan asset tetap yang memiliki kontribusi terbesar, presentase kenaikan dari tahun ke tahun tersebut menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar.

Total kewajiban Kota Probolinggo yang keseluruhannya merupakan kewajiban lancar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 14.981.305.536,23. Total kewajiban Kota Probolinggo tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 12,83% atau 13.059.407.482,06 dan 52,71% atau Rp. 7.084.525.875,94. Sedangkan pada tahun 2020 total kewajiban Kota Probolinggo kembali mengalami kenaikan yaitu 3,19% atau 17.127.685.544,34. Presentase kenaikan maupun penurunan dalam perhitungan menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar.

## Analisis Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020

### 1. Solvabilitas Jangka Pendek

#### Perhitungan Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Kota Probolinggo Tahun 2017-2020

| Tahun | Kas dan setara kas    | Investasi Jk Pendek | Kewajiban Lancar     | Solvabilitas Jk Pendek |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 2017  | Rp 224,361,547,534.35 | Rp -                | Rp 14,981,305,536.23 | 14.98                  |
| 2018  | Rp 266,464,280,015.86 | Rp -                | Rp 13,059,407,482.06 | 20.4                   |
| 2019  | Rp 169,603,170,797.96 | Rp -                | Rp 7,084,525,875.94  | 23.94                  |
| 2020  | Rp 204,024,026,899.21 | Rp -                | Rp 15,459,346,447.94 | 13.2                   |

Berdasarkan analisis dari tahun 2017-2019 rasio dimensi solvabilitas jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo memiliki tren naik namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan di sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga berakibat pada penurunan rasio solvabilitas jangka pendek di Kota Probolinggo. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya kewajiban lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Rasio solvabilitas jangka pendek di Kota Probolinggo pada tahun 2017 sebesar 14,98; pada tahun 2018 sebesar 20,40; pada tahun 2019 sebesar 23,94 dan pada tahun 2020 turun menjadi 13,20. Hal ini menunjukkan bahwa total aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo cukup mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancarnya, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Menurut beberapa literatur yang penulis baca menunjukkan bahwa jika perhitungan rasio lebih dari 1 maka dapat dikatakan dalam kondisi baik.

### 2. Solvabilitas Jangka Panjang

#### Perhitungan Rasio Solvabilitas Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2017-2020

| Tahun | Total Aset Tetap        | Kewajiban Jangka Panjang | Solvabilitas Jk Panjang |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2017  | Rp 1,260,067,192,535.47 | Rp 14,981,305,536.23     | 84.11                   |
| 2018  | Rp 1,301,883,268,367.33 | Rp 13,059,407,482.06     | 99.69                   |
| 2019  | Rp 1,384,089,316,597.47 | Rp 7,084,525,875.94      | 195.37                  |
| 2020  | Rp 1,481,313,120,271.64 | Rp 15,459,346,447.94     | 95.82                   |

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio solvabilitas jangka panjang dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir ini mengalami naik turun, presentase tertinggi berada di tahun 2019 hanya Rp 7.084.525.875,94 sedangkan total aset tetap yang cukup besar yaitu Rp 1.384.089.316.597,47 sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap hasil dari solvabilitas jangka panjang, sedangkan untuk presentase terendah ada di tahun 2017 yaitu 84,11 hal ini dikarenakan tingginya total kewajiban dari Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Rp 14.981.305.536,23 dengan total aset Rp 1.260.067.192.535,47.

### 3. Solvabilitas Layanan

#### Perhitungan Rasio Solvabilitas Layanan Kota Probolinggo Tahun 2017-2020

| Tahun | Total Aset Tetap        | Jumlah Penduduk | Solvabilitas Layanan |
|-------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 2017  | Rp 1,260,067,192,535.46 | 118301          | 10,651,365.52        |
| 2018  | Rp 1,301,883,268,367.33 | 119423          | 10,901,445.02        |
| 2019  | Rp 1,384,089,316,597.47 | 120391          | 11,496,617.83        |
| 2020  | Rp 1,481,313,120,271.64 | 121340          | 12,207,953.85        |

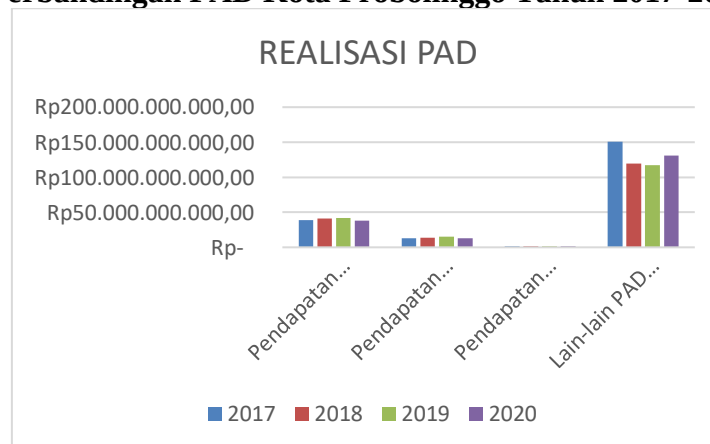
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rasio dimensi solvabilitas pelayanan, terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti Pemkot Probolinggo memiliki

kemampuan yang baik dalam menjaga komitmen pelayanan publiknya. Hasil rasio solvabilitas jasa tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp 12.207.935,85 hal ini disebabkan oleh total aset yang lebih besar sebesar Rp 1.481.313.120.271,64 dan pertumbuhan penduduk yaitu sebesar Rp 121.340. Besarnya rasio pada dimensi keterjangkauan sebagai suatu layanan sangat bergantung pada populasi. Untuk itu, agar nilai tersebut terus tumbuh positif, Pemkot Probolinggo harus mengelola aset tetapnya secara efektif sehingga dapat mengimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai rasio terhadap solvabilitas. dimensi layanan.

### **Perubahan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dilihat dari jenis Pendapatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Pendapatan Kota Probolinggo dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah. Pendapatan daerah sendiri adalah semua penerimaan kas dalam suatu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Kondisi yang tidak terduga berupa wabah Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana masyarakat diharuskan bekerja dari rumah (WFH) untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dan oleh karena itu, kondisi keuangan masyarakat juga terpengaruh. Dampak kondisi keuangan juga berimbas pada pemerintah, mulai dari fokus pembiayaan dialihkan ke kesehatan dan langkah-langkah lainnya agar pemerintah bisa menjalankan semua rencana dalam APBD namun tetap bisa mengayomi dan membantu masyarakat sebelum dan sesudah bencana wabah Covid-19. Pada poin ini penulis akan menganalisis bagaimana perubahan pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo di tengah pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

#### **Perbandingan PAD Kota Probolinggo Tahun 2017-2020**



Berdasarkan hasil komparasi grafik di atas, terlihat bahwasannya realisasi pendapatan Kota Probolinggo khususnya dalam kelompok akun Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu jenis akun lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 130.930.786.719,24 pada tahun 2020 *unaudited*, Rp. 117.180.929.088,35 pada tahun 2019, Rp. 119.769.002.869,20 pada tahun 2018 dan Rp. 150.723.432.850,59 pada tahun 2017. Pendapatan akun lain-lain PAD yang sah Kota Probolinggo sendiri berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Dr. Moh. Saleh, Pendapatan Bunga Deposito dan Pendapatan Penerimaan Jasa Giro. Sementara kontribusi PAD kedua tertinggi yaitu berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 41.902.567.410,00 pada tahun 2019, disusul oleh Retribusi Daerah secara berturut-turut pada tahun 2017-2020 yaitu sebesar Rp. 13.059.933.889,00 pada tahun 2017, Rp. 13.446.115.747,00 pada tahun 2018, Rp. 15.364.512.987,00 pada tahun 2019 dan Rp. 12.623.367.905,55 pada tahun 2020. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.

1.704.846.568,40 pada tahun 2020 *unaudited*, Rp. 1.327.277.131,47 pada tahun 2019, Rp. 1.376.617.776,70 pada tahun 2018 dan Rp. 1.403.455.530,28 pada tahun 2017.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan perkembangan kondisi kesehatan keuangan daerah melalui pengukuran indikator kondisi keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 di Pemerintah Kota Probolinggo periode 2017-2020, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan indikator solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang Kota Probolinggo memiliki trend yang masih fluktuatif namun tidak terlalu signifikan dan nilai rasionya mendekati atau melebihi angka 1, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo masih mampu mengatasi hal-hal terkait biaya operasional dan kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek.
2. Kemudian terkait dengan indikator solvabilitas pelayanan, Kota Probolinggo memiliki trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya, artinya belanja yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Probolinggo semakin baik.
3. Namun indikator penilaian lain juga harus diterapkan untuk menilai keakuratan dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan terkait kondisi keuangan sebelum dan selama pandemi, pendapatan Kota Probolinggo cenderung menurun secara keseluruhan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, penurunan tersebut disebabkan pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan serta pendapatan transfer dari pemerintah provinsi.

## Keterbatasan

1. Penulis membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Probolinggo untuk pengambilan data penelitian. Sedangkan ketika penelitian dilakukan sumber daya manusia dalam objek penelitian tidak dapat membimbing secara langsung karena berkenaan dengan adanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
2. Data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan perhitungan indikator kondisi keuangan berupa Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Jangka Pendek dan Solvabilitas Layanan, sehingga tidak dapat membandingkan antara kota satu dengan yang lain dengan menggunakan 6 (enam) indeks dimensi kondisi keuangan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan jarak.
3. Pengendalian internal masih belum dapat menggunakan sistem dengan baik saat melakukan dan mengelola keuangan daerah, karena kurang pengetahuannya tentang LKPD dan sistem yang ada di Pemerintah Daerah yang sesuai dengan instrumen yang dibutuhkan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan analisis terkait Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah Melalui Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Kondisi Keuangan Daerah, berikut beberapa saran yang diharapkan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kesehatan keuangan daerah di masa mendatang yaitu :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama pandemi khususnya untuk PAD yang berasal dari transaksi yang bersifat *online* dikarenakan pada masa pandemi ini banyak kegiatan dan layanan yang mulai beralih memanfaatkan teknologi informasi atau secara *digital*.



2. Pemerintah Daerah diharapkan lebih efisien dan efektif dalam mengelola pendapatan khususnya diimbangi dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik sehingga tindak kecurangan dapat meminimalisir dan pengembangan transaksi non-tunai untuk meningkatkan SPI.
3. Terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan juga sertifikasi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan berdasarkan skala prioritas dan tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alting, U., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 89–97. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20018.2018>
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah - BPPKAD Kota Probolinggo. (n.d.). Retrieved January 17, 2022, from <https://bppkad.probolinggokota.go.id/>
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2010). *Intermediate financial management*. 1041.
- Hastaningrum, S., & Ritonga, I. T. (2015). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information System*, 4(4).
- Lumbantoruan, E. P., & Hidayat, P. (2013). *Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 14–27.
- Luska, 2020 dalam Indonews.id. (n.d.). Retrieved January 17, 2022, from <https://indonews.id/artikel/28799/OTDA-1999-COVID-19-dan-MUDIK-2020/>
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2, 140–162.
- Melalolin, M. L. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Darah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13518>

\*) **Karisma** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

\*\*) **Maslichah** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

\*\*\*) **Afifudin** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang